

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan berfokus pada Dampak Penangguhan *Visiting Forces Agreement* kaitan dengan hubungan Diplomatik Filipina dan Amerika Serikat. Dilihat dari sejarah hubungan kedua negara, hubungan Amerika-Filipina didasarkan pada sebuah hubungan historis serta memiliki budaya politis yang kokoh dan memiliki komitmen bersama terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Pada tahun 1951, Amerika-Filipina setuju untuk menandatangani sebuah perjanjian kerjasama dalam bidang keamanan yang disebut dengan *Mutual Defense Treaty*. *Mutual Defense Treaty* sendiri merupakan bentuk kerjasama di bidang militer dalam mempertahankan kedaulatan antar kedua negara tersebut. Kedua negara akan memberikan dukungan diplomatik untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan salah satu pihak.¹

Mutual Defense Treaty bertujuan agar Amerika dan Filipina dapat menyelesaikan konflik internasional yang melibatkan salah satu pihak secara damai dan menghindari penggunaan kekuatan militer demi mencapai perdamaian internasional. Perjanjian ini juga berarti kedua belah pihak dapat memperoleh atau mengembangkan strategi militer untuk keamanan regional. Amerika dan Filipina melalui Menteri Luar Negeri masing-masing negara akan berkonsultasi secara rutin untuk membahas keamanan regional di Asia Pasifik.²

Berdasarkan sejarah dapat dilihat bahwa AS-Filipina merupakan sekutu alami di Asia Tenggara. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menangkal pengaruh Tiongkok. Namun dalam perkembangannya saat ini hubungan AS-Filipina yang merenggang pada tahun 2020,³ ditandai dengan berakhirnya sejumlah kerja sama AS-Filipina di berbagai aspek kenegaraan. Salah satunya adalah *Visiting Forces Agreement* pada awal tahun 2020 yang ditangguhkan hingga tahun 2021 bulan Agustus.⁴ *Visiting Forces Agreement* (VFA) ditandatangani tahun 1998 dan

¹ Vaughn, B. (2007). U.S. Strategic and Defense Relationships in the Asia-Pacific Region. Congressional Research Service.

² Perez-Rubio, B. (2021, Januari 28). US reaffirms commitment to Mutual Defense Treaty with Philippines. Retrieved from [www.philstar.com:https://www.philstar.com/headlines/2021/01/28/2073688/us-reaffirms-commitment-mutual-defense-treaty-philippines](https://www.philstar.com/headlines/2021/01/28/2073688/us-reaffirms-commitment-mutual-defense-treaty-philippines)

³ Goh, E. (2005). MEETING THE CHINA CHALLENGE: THE U.S. IN SOUTHEAST ASIAN REGIONAL SECURITY STRATEGIES.

⁴ *ibid*

merupakan sebuah kerjasama militer antar dua negara dimana suatu pihak mengunjungi negara lain untuk berlatih bersama dengan menawarkan segala peralatan yang dibawa dari negara asal untuk digunakan di negara tujuan.⁵

VFA memiliki bentuk kerjasama seperti contohnya tentara Amerika berkunjung ke Filipina dan berlatih bersama tentara Filipina. VFA tidak hanya meliputi latihan gabungan militer, namun juga pemindahan alat-alat perang seperti pesawat, kapal perang, amunisi, kendaraan lapis baja, juga ekspor-impor segala kebutuhan tentara Amerika selama kunjungan mereka di Filipina. VFA merupakan bentuk penegasan dari *Mutual Defense Treaty* yang di tandatangani pada tahun 1951.⁶

Selain dukungan militer, VFA juga memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kepada operasi bantuan kemanusiaan Filipina. Duta Besar Amerika Philip Goldberg (2013-2016) untuk Filipina menekankan peran militer Amerika ketika Topan Yolanda yang merusak sebagian besar wilayah Visayas di Filipina. Sementara negara-negara lain masih harus menunggu keputusan pemerintah Filipina untuk mengizinkan pasukan mereka memasuki Filipina, Amerika segera mengerahkan pasukannya sendiri, memberikan dukungan langsung kepada para korban dan kepada pemerintah nasional. Amerika menyediakan 335.000 liter air dan 36.360 kilo makanan dan pasokan melalui kapal USS George Washington. Menurut Goldberg, ini semua dimungkinkan karena VFA.⁷

VFA dapat menjadi keuntungan besar bagi Filipina terutama dalam meningkatkan peralatan militer dan pelatihan personel militer. Sementara AS memiliki kepentingan militer dimana untuk menyeimbangkan terhadap pengaruh Tiongkok.⁸ Kehadiran militer AS yang berkelanjutan di Filipina (yang disediakan VFA) dan di Asia Timur sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan regional. Sementara itu kerjasama ini bisa dibilang lebih baik bagi Filipina dalam memitigasi geopolitiknya.⁹ Negara-negara kecil memandang pembentukan hubungan keamanan dengan negara lain sebagai panggung utama untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, terutama dalam konteks tantangan keamanan bersama.

⁵ Velasco, M. A. (2015, November). The Visiting Forces Agreement (VFA) in the Philippines: Insights on Issues of Sovereignty, Security and Foreign Policy. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 3, No. 4.

⁶ *ibid*

⁷ *ibid*

⁸ Ndadari, A. B. (2017, September). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 6, NO. 1,*

⁹ Ndadari, A. B. (2017, September). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 6, NO. 1.,*

VFA memfasilitasi tujuan ini dalam memperluas ruang kerja sama keamanan Filipina. Misalnya, latihan tahunan Filipina-AS Balikatan telah berevolusi dari kegiatan bilateral ke multilateral.¹⁰

Pada Februari tahun 2020, Duterte mengancam akan mengakhiri VFA. Sikap Filipina dipandang sebagai barometer hubungan AS-Filipina. Para pengamat percaya keputusan Duterte untuk menghentikan VFA berarti Filipina mulai beralih pada Tiongkok daripada AS untuk kerjasama regional di Asia Tenggara khususnya di Laut Tiongkok Selatan. Sejak 2016 ketika Duterte mengambil alih kekuasaan, Duterte telah mengerahkan banyak upaya untuk meningkatkan hubungan Filipina dengan Tiongkok. Dapat dibuktikan dengan Duterte yang telah mengambil pendekatan lebih damai terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sebuah isyarat penting terjadi ketika dia mengatakan “benar-benar tidak ada dendam sama sekali, hanya politik” dalam pidato kenegaraan terakhirnya pada 26 Juli 2021.¹¹

Meskipun demikian, para politisi pro-AS di Filipina memiliki pengaruh besar pada politik negara dan pengaruh Amerika Serikat di Filipina sangat besar. Kedua faktor tersebut telah berfungsi untuk mengimbangi upaya Duterte untuk mempromosikan hubungan Tiongkok-Filipina. Keputusan Duterte untuk mempertahankan VFA dapat dilihat sebagai kompromi terhadap kekuatan politik domestik. AS dan politikus pro-AS di Filipina telah bekerja sama dalam hal ini. Tapi itu tidak berarti Filipina akan menyelaraskan diri dengan AS untuk menghadapi Tiongkok.¹²

Perubahan sikap Duterte terhadap VFA dimungkinkan karena alasan berikut; Tahun 2016, Duterte menjalankan kampanye kepresidenan yang berfokus pada penindakan keras terhadap narkoba, khususnya Metamfetamina, dengan meyakinkan masyarakat bahwa narkoba telah menyusup ke pemerintah dan merupakan akar dari masalah negara. Pada Juni 2016, Presiden Duterte yang baru terpilih meluncurkan perang terhadap narkoba dengan kekuatan militer negara, yang sejauh ini diklaim hampir merengut 27.000 jiwa menurut aktivis dan sekitar 6.600 jiwa menurut pemerintah.¹³

United Nations World Report of Drug tahun 2015 menerbitkan laporan tahunan yang menempatkan negara Filipina pada urutan kelima sebagai negara

¹⁰ Rosa, J. P. (2017, Agustus). Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 13(2), 346-366; 2017.

¹¹ Babb, C. (2021, July 30). Philippines Says US Visiting Forces Agreement to Remain in Effect. Retrieved from [www.voanews.com](https://www.voanews.com/east-asia-pacific/philippines-says-us-visiting-forces-agreement-remain-effect): <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/philippines-says-us-visiting-forces-agreement-remain-effect>

¹² *ibid*

¹³ United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). Philippines Country Report. Retrieved https://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf

penghasil narkoba jenis mariyuana untuk kawasan Asia dan Oceania. Perdagangan ini didukung oleh banyaknya pulau-pulau kecil di Filipina yang mencapai 7.641 pulau sehingga memudahkan pengedaran melalui jalur laut. Hal ini menjadi tantangan bagi polisi, angkatan laut, dan militer untuk memantau dan mengawasi kegiatan peredaran narkoba. Maka pada akhirnya, Filipina tidak hanya menjadi titik transit, tetapi juga produsen narkoba di seluruh Asia.¹⁴

Sebelum menjadi presiden, Duterte menjabat sebagai walikota Davao dan pernah menjadi pengacara. Sebagai mantan walikota Kota Davao selama 22 tahun, Duterte telah bersumpah untuk menghilangkan kejahatan dan narkoba dengan menargetkan pengedar dan pengguna narkoba melalui pembunuhan di luar hukum dalam skala besar. Selama karir politiknya, Duterte dikenal kontroversial karena berhasil menjadikan kota Davao yang sebelumnya terkenal dengan tingkat kejahatan tertinggi dan perang antar etnis di Filipina menjadi kota paling aman. Perubahan di Kota Davao ini dapat diatasi Duterte melalui pasukan khusus untuk memberantas kegiatan kriminal yang dikenal sebagai *Davao Death Squad* (DDS). Pasukan ini bertanggung jawab atas eksekusi penjahat tingkat rendah seperti pencuri, pemerkosa, atau pengedar narkoba.¹⁵

Kesungguhan Duterte setelah menjadi presiden Filipina terlihat dengan kampanye *War on Drugs* dalam bentuk operasi militer *double barrel*. Kampanye ini dilaksanakan dengan diiringi terbitnya peraturan-peraturan *Anti-illegal drugs* dari lembaga pemerintahan di Filipina. Salah satu wujud legalitasnya ialah *Command Memorandum Circular* (CMC) No.16-2016 tentang operasi *double barrel* yang menjadi landasan penerapan kampanye *war on drugs* bagi Kepolisian Nasional Filipina. Dorongan presiden Duterte untuk mengeksekusi para pengedar narkoba diikuti dengan meningkatnya pembunuhan diluar hukum. Para anggota polisi Filipina juga ikut menyumbangkan angka kematian dalam pembunuhan diluar hukum yang luar biasa banyak. Duterte menyebut ini sebagai pencapaian hebat dalam perang melawan narkoba.¹⁶

Penerapan *war on drugs* dalam proyek *double barrel* dilaksanakan melalui dua operasi besar, *Tokhang* dan *High Value Target* (HVT). Disini operasi *Tokhang* menargetkan para pengguna dan pengedar narkoba dalam jumlah yang lebih kecil. Sementara operasi HVT menjadi operasi besar-besaran dalam mengejar sindikat narkoba. Kedua operasi tersebut memiliki fungsi untuk “membersihkan” dan

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Karl Hapal, S. J. (2018). Police Violence and Corruption in the Philippines: Violent Exchange and the War on Drugs. 39-62.

¹⁶ Neil Jerome Morales, M. T. (2019, July 28). War on numbers: Philippines targets drug killing data. Diakses dari www.reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs/war-on-numbers-philippines-targets-drug-killing-data-idUSKCN1UD1CJ>

membongkar sindikat-sindikata narkoba yang terjadi di Filipina. Namun operasi yang awalnya hanya berguna untuk menetralisasi berujung petaka bagi para pengedar dan pengguna narkoba khususnya dalam operasi Tokhang. Operasi yang harusnya berjalan dengan prosedur penyerahan diri dan pernyataan ketersediannya para pengedar untuk direhabilitasi, nyatanya dibersihkan dengan cara dibunuh tanpa melalui proses hukum. Alhasil operasi ini banyak menuai kematian pengedar narkoba di wilayah-wilayah kecil yang rata-rata berekonomi menengah kebawah. Hingga akhirnya operasi penerapan war on drugs ini dikutuk oleh para pegiat HAM.¹⁷

Perang terhadap narkoba telah melibatkan petugas polisi untuk membunuh tersangka pengedar dan pengguna narkoba berdasarkan daftar kompilasi yang disusun oleh kepolisian kota setempat. Pada akhir 2018, ketua Komisi Hak Asasi Manusia Filipina, Chito Gascon, memperkirakan jumlah yang tewas dalam perang narkoba mencapai 27.000. Pembunuhan di luar hukum di Filipina telah menarik banyak perhatian karena skalanya yang besar. Meskipun ribuan pembunuhan terjadi, hanya segelintir dari investigasi telah terjadi, dan tidak ada satu pun pejabat pemerintah yang dihukum.¹⁸

Keputusan Duterte dalam *War On Drugs* membuat organisasi HAM seperti *International Amnesty* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, menyerukan investigasi mereka sendiri yang berujung pada dakwaan bahwa pembunuhan tanpa pengadilan yang dilakukan Duterte telah melanggar kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998 karena memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai pada Pasal 7 Statuta Roma 1998 yaitu terjadinya pembunuhan yang dilakukan secara meluas atau sistematis dan dilakukan oleh aparat negara.¹⁹

Selain protes dan investigasi dari INGO yang bergerak di bidang kemanusiaan, presiden AS Barrack Obama pada tahun 2016 di Laos saat KTT ASEAN mengungkapkan kritiknya terhadap pilihan Duterte mengenai pembunuhan tanpa pengadilan²⁰. Hal ini dibalas oleh Duterte dalam pidatonya di konferensi pers di Filipina yang menyatakan penyesalannya terhadap keputusan Amerika yang ikut campur terlalu banyak dalam urusan dalam negeri Filipina.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Amnesty International. (2016, October). Philippines: Duterte's 100 days of carnage. Diambil kembali dari [amnesty.org](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/philippines-dutertes-hundred-days-of-carnage/): <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/philippines-dutertes-hundred-days-of-carnage/>

²⁰ Rappler. (2016, September). Obama to Duterte: Fight crime, terror 'the right way'. Diambil kembali dari Rappler: <https://www.rappler.com/nation/obama-duterte-crime-war-right-way>

Duterte bahkan menambahkan ungkapan seperti “*Mr. Obama, you can go to hell* (Presiden Obama, anda bisa pergi ke neraka).”²¹

Pada Januari 2020, Senator Filipina Ronald Dela Rosa membenarkan bahwa pemerintah AS telah mencabut visanya ke Amerika Serikat. Mantan kepala polisi di bawah Presiden Rodrigo Duterte tersebut telah terlibat dalam pembunuhan di luar proses hukum yang terkait dengan *War On Drugs*. Tindakan AS mewakili perubahan kebijakan terhadap pemerintah Filipina dan *War On Drugs*, dan menunjukkan bahwa AS tidak akan berhubungan diplomatik dengan pejabat pemerintah yang secara langsung terlibat dalam pembunuhan tanpa proses hukum di Filipina.²²

Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah AS mencoba menegaskan kepada pemerintahan Filipina bahwa kebijakan ini berlaku untuk semua pejabat pemerintah Filipina yang terkait dengan *War On Drugs*. AS disini mencoba mengirimkan pesan penting bagi para pejabat pemerintahan Filipina bahwa keterlibatan mereka dalam kejahatan Duterte akan membuat mereka menjadi target non-grata di AS.²³

Duterte pada waktu yang sama merespon hal ini dengan mengancam pemberhentian kerjasama VFA. Duterte menganggap ketidakadilan terjadi, dimana tentara AS bebas keluar-masuk Filipina dan berlatih di Filipina sementara Senator mereka dicabut kekebalan diplomatiknya.²⁴ VFA pada akhirnya ditangguhkan dan baru pada Agustus 2021 VFA dipulihkan.

Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Filipina selalu berusaha mempertimbangkan kepentingan nasional terbaik negara itu. Politisi Filipina berusaha cukup bijaksana untuk menyadari bahwa negara mereka tidak boleh mengorbankan kepentingannya sendiri dengan melayani tuntutan AS. Disisi lain bermusuhan dengan tetangga yang kuat seperti Tiongkok bukanlah keputusan strategis untuk negara seperti Filipina.²⁵

Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan sebab sejauh ini penelitian–penelitian terkait Filipina dan pemerintahan Duterte dari perspektif Hubungan Internasional, rata–rata membahas mengenai kepentingan Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Namun pembahasan mengenai hubungan diplomatik Filipina–

²¹ Bussines Insider. (2016, Oktober). Philippines President Duterte: 'Mr. Obama, you can go to hell'. Diambil kembali dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=zkxDbCctEaQ>

²² CNN, E. S. (2020, January). Dela Rosa confirms his US visa has been canceled. Diambil kembali dari CNN: <https://cnnphilippines.com/news/2020/1/22/ronald-bato-dela-rosa-united-states-visa.html?fbclid=IwAR0IDW0kEf6YKN8ndKSVQmtkgS53li14rOE2MhLGw6XI0qXH4DHaj7devYw>

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*

Amerika akibat penanggulangan kebijakan seperti VFA masih sangat sedikit di Indonesia. Oleh karenanya disini penulis bertekad untuk meneliti sejauh mana pengaruh peran Rodrigo Duterte dalam penanggulangan kerjasama VFA terhadap hubungan diplomatik AS-Filipina.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang serta urgensi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah pertanyaan penelitian, yaitu, *“Bagaimana peran Rodrigo Duterte dalam War On Drugs mempengaruhi penanggulangan VFA (Visiting Forces Agreement) selama periode tahun 2020-2021”*

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disini adalah:

- A. Menjelaskan tentang kebijakan Rodrigo Duterte dalam penanggulangan *Visiting Forces Agreement* tahun 2020-2021.
- B. Memberikan informasi terkait perkembangan krisis hubungan bilateral Filipina-Amerika.
- C. Mengaplikasikan konsep-konsep dalam Hubungan Internasional dalam sebuah masalah yang dapat dijadikan karya tulis ilmiah.
- D. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam kasus sejenis.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka disini peneliti menentukan sebuah fokus penelitian dan tujuan yang nantinya dapat dicapai, maka diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai hubungan bilateral Filipina-Amerika lebih dalam di era pemerintahan Rodrigo Duterte. Penelitian ini nantinya dapat diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam mengkaji isu-isu Asia Tenggara di dunia internasional.

Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia, untuk dijadikan salah satu rekomendasi dalam kebijakan-kebijakan luar negeri yang berhubungan dengan Amerika Serikat.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan berdasarkan beberapa penulisan dari penelitian-penelitian sebelumnya atau analisa yang berhubungan dengan penulisan ini.

Penelitian terdahulu ini nantinya akan digunakan sebagai pernyataan atau penegasan akan kebaruan dan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam kasusnya penelitian ini berfokus pada pemerintahan Filipina sebagai objek utama penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki kaitan atau kemiripan kasus dengan penelitian ini;

Penelitian pertama adalah jurnal **Julio S. Amador III** dengan judul **Eyes On The Prize? The Philippines-US Alliance and Defense Modernization**²⁶. Dalam penelitiannya, jurnal ini membahas mengenai VFA dan kebijakan turunannya yaitu; *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA). Disebutkan bahwa perjanjian pertahanan militer antara Amerika dan Filipina seharusnya menguntungkan dua belah pihak, bukannya hanya satu pihak saja. Alasan mengapa beberapa masyarakat Filipina memiliki sentimen Anti-EDCA adalah karena mereka merasa dicurangi Amerika dan melanggar integritas dan kedaulatan wilayah teritorial Filipina.

Masyarakat yang menentang EDCA percaya bahwa EDCA telah menyalahi aturan mengenai pangkalan militer asing di Filipina. Jawaban pemerintah Filipina mengenai ini adalah EDCA adalah perjanjian eksekutif dan bukannya traktat jadi Senat tidak perlu membuat konsesi. EDCA, ditandatangani pada 2014 April oleh Menteri Pertahanan Nasional Voltaire Gazmin untuk Filipina, dan Duta Besar Philip Goldberg untuk AS, merevitalisasi aliansi keamanan bilateral Filipina-AS untuk membantu Filipina mencapai pertahanan minimum yang kredibel untuk menanggapi tantangan keamanan regional dan global. Perjanjian ini mengimplementasikan kebutuhan untuk mengembangkan Filipina dan kemampuan pertahanan AS dalam Kawasan Asia Pasifik sebagaimana disepakati dalam *Mutual Defence Treaty* (MDT) dan *Visiting Force Agreement* (VFA). EDCA mengizinkan dan mengatur akses dan penggunaan beberapa fasilitas Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) oleh militer AS.

Ini memungkinkan keduanya untuk melakukan latihan kerja sama keamanan berdampak tinggi dan bernilai tinggi, gabungan pelatihan yang mempromosikan interoperabilitas, dan peningkatan kapasitas. Hasil daripada penelitian ini membahas secara detil bahwa Filipina tidak boleh kehilangan

²⁶AMADOR, J. S. (2014, December 18). Eyes on the Prize? The Philippines-US.

kredibilitasnya sementara tetap mempertahankan keuntungan pertahanan militer yang ditawarkan Amerika. Jenis penelitiannya adalah penelitian eksplanatif.

Kedua, jurnal dari **Aaron Jed Rabena** dengan judul **Philippines-US Alliance Under Duterte: Unravelling?**²⁷. Penelitian ini menjelaskan mengenai sejarah hubungan Filipina-Amerika di bidang pertahanan militer. Hal ini meliputi *Mutual Defence Treaty*, *Visiting Force Agreement*, serta *Enhanced Defense Cooperation Agreement*.

Aliansi Filipina-AS berlabuh pada tiga dokumen utama: *Mutual Defence Treaty* (MDT), VFA 1998, dan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* 2014 Perjanjian (EDCA). MDT adalah perjanjian induk yang menguraikan kerangka kerja dan tujuan umum aliansi. Seperti MDT, VFA adalah perjanjian yang diratifikasi oleh Senat Filipina yang menetapkan syarat dan kondisi saat personel militer AS masuk di Filipina. Sementara VFA dan EDCA telah berguna dalam memenuhi keamanan Filipina, khususnya persiapan perang konvensional dan kontinjensi keamanan, AS-Filipina belum secara substansial efektif dalam menghalangi kepentingan Tiongkok di laut Tiongkok selatan seperti pada peristiwa *Scarborough Shoal Standoff* tahun 2012 dan operasi reklamasi pulau di Laut Tiongkok Selatan. Peneliti bahkan menjabarkan persepsi Filipina dalam pandangannya terhadap aliansi dengan Amerika. Penelitian ini cenderung lebih membahas sisi sejarah ketimbang politik. Jenis penelitiannya adalah deskriptif.

Yang ketiga jurnal dari **Mark Anthony M. Velasco** dengan judul **The Visiting Forces Agreement (VFA) in the Philippines: Insights on Issues of Sovereignty, Security and Foreign Policy**²⁸. Penelitian ini membahas mengenai *Visiting Force Agreement* dengan Amerika dan *Status of the Visiting Forces Agreement* dengan Australia.

Pada tahun 1999, Filipina menyadari pentingnya kehadiran angkatan bersenjata AS di negaranya karena ancaman eksternal dari Tiongkok. Ancaman datang ketika Tiongkok merayap untuk menduduki pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan. Kehadiran AS di Filipina dimaksudkan akan menjaga keseimbangan kekuasaan di perairan tersebut dikarenakan ada kekuatan yang memiliki kapasitas untuk menetralsir setiap agresi Tiongkok. Oleh karena itu, VFA diratifikasi oleh Senat Filipina pada tahun 1991. Perjanjian ini merevitalisasi lagi hubungan militer antara Amerika Serikat Amerika dan Filipina.

²⁷ Rabena, A. J. (2020, Februari). Philippines US Alliance Under Duterte : Unravelling?

²⁸ Velasco, M. A. (2015, November). The Visiting Forces Agreement (VFA) in the Philippines: Insights on Issues of Sovereignty, Security and Foreign Policy. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 3, No. 4..

Penegakan VFA menjadi tindakan realisasi dan bukti konkret pada bagaimana Filipina memmanifestasikan kepentingannya dengan Amerika Serikat. Angkatan Bersenjata Filipina berhak mendapat pelatihan militer bersama tantara Amerik dan latihan untuk melawan serangan teroris. Pelatihan militer gabungan ini meliputi, kesiapan tempur, dan interoperabilitas sekaligus untuk meningkatkan hubungan keamanan dua negara. Dari jurnal tersebut disebutkan bahwa meskipun Filipina mendapatkan keuntungan dari VFA dan SOVFA namun ada hal yang lebih besar yang harus diperhatikan, yaitu integritas Filipina sebagai negara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif.

Keempat adalah jurnal dari **Renato Cruz De Castro** dengan judul **The Death of EDCA and Philippine-U.S. Security Relations**. Membahas tentang bagaimana EDCA yang secara langsung non-aktif setelah VFA berakhir dan bagaimana pandangan Rodrigo Duterte tentang masalah Laut Tiongkok Selatan.

Pada akhir pemerintahan Aquino pada pertengahan 2016, hubungan keamanan Filipina-AS berada di puncak keakraban dalam seperempat abad, dimana fokus ini dipengaruhi oleh ancaman dari Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Empat tahun kemudian, keputusan Presiden Duterte pada february 2020 untuk menarik Filipina dari VFA telah membuat EDCA tidak dapat dioperasikan. Hal ini tentu melemahkan Amerika dalam mobilisasi personelnnya di Asia Tenggara.

Dalam interviewnya dengan *South China* Duterte mengatakan bahwa AS akan mengambil keuntungan dari gejolak politik di Laut Tiongkok Selatan terlepas dari statusnya sebagai sekutu Filipina. Jenis penelitian ini adalah eksplanatif.

Penelitian kelima ada jurnal dari **Julius Cesar Trajano** dengan judul **“US-Philippines: Resetting the Security Alliance**. Membahas sejarah kedalaman jalinan kerjasama Filipina-AS yang telah mengakar sejak awal kemerdekaan Filipina.

Penelitian ini membahas bagaimana Filipina menjadi gerbang masuk Amerika ke Asia Tenggara. Menjabarkan secara detail bagaimana kerjasama di bidang keamanan memiliki manfaat yang besar dari segi militer. Sebagai contohnya Filipina akan mendapatkan fasilitas dan perlengkapan militer Amerika untuk digunakan selama latihan gabungan. Sementara Amerika bisa mendapatkan tambahan pangkalan militer di Asia Tenggara. Namun dengan ancaman Duterte untuk menghentikan VFA membuat Amerika harus mengevaluasi apa saja kesalahan selama periode 2016-hingga saat ini yang menyebabkan Filipina menolak memperpanjang kerjasama VFA mereka. Jenis penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian keenam adalah jurnal **Melita Angelin Bidara, Michael Mamentu, dan Trilke Tulung** dengan judul **“Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan”**.²⁹ Penelitian ini menganalisa bagaimana kepentingan dan keterlibatan AS dalam konflik LTS. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dalam menganalisis dan menjelaskan pokok bahasan. Konsep kepentingan nasional yang digunakan oleh penulis merupakan konsep kepentingan yang dicetuskan oleh Donald E. Nuechterlin. Penjelasan tentang konsep kepentingan nasional yang ditawarkan oleh Nuechterlin memiliki 4 jenis kepentingan nasional. Penulis hanya menggunakan tiga diantaranya. Diantara tiga jenis kepentingan nasional tersebut antara lain adalah; 1) kepentingan ekonomi, 2) kepentingan pertahanan, 3) kepentingan tata internasional.

Penelitian ketujuh ada jurnal dari **Arief Bakhtiar Darmawan dan Gebyar Lintang Ndadari** dengan judul **“Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama”**.³⁰ Kebijakan luar negeri AS untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sengketa LTS menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Melainkan karena sifat isu sengketa LTS yang penuh benturan kepentingan serta memiliki potensi menimbulkan gangguan stabilitas Kawasan di Asia Tenggara, keterlibatan AS juga menarik karena AS bukan merupakan pihak yang bersengketa langsung dalam klaim wilayah di LTS. Pergeseran kebijakan AS menjadi *‘high-profile intervention’* di kawasan Asia-Pasifik lebih kepada kaitan AS terhadap keamanan nasional yang harus dilindungi, baik dalam wilayah yang disengketakan maupun pada negara-negara di kawasan tersebut. Disini AS menyatakan bahwa kehadirannya di sengketa LTS merupakan upaya untuk menjaga kebebasan navigasi kapal-kapal di perairan internasional dan mengurangi resiko sengketa di serta tidak mendukung pihak mana pun dalam sengketa.

Meski begitu keberadaan AS yang netral dan tidak melakukan klaim wilayah dalam sengketa LTS merupakan bagian dari strategi perimbangan kekuatan di LTS. Sebagai kekuatan penyeimbang, AS menerapkan pendekatan melalui kerja sama militer dengan Filipina dan Vietnam memberikan bantuan-bantuan keamanan meskipun anggaran cenderung menurun, serta melanjutkan penjualan senjata ke negara-negara dagang utama di Asia Tenggara. AS juga melihat bahwa LTS yang relative damai dan stabil merupakan sebuah prioritas penting untuk keamanan nasional AS sendiri.

²⁹ Angelin Bidara, Mamentu, and Tulung, “KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN.”

³⁰ Ndadari, A. B. (2017, 2017). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 6, NO. 1,.

Penelitian kedelapan ada penelitian dari **Diba Amalia Asano** dengan judul **“Kerjasama Pertahanan Amerika Serikat dan Filipina Dalam Konteks Buckpassing Tahun 2014-2016”**. Kawasan Asia Pasifik terutama LTS memiliki arti penting untuk AS. Terdapat dua prinsip kepentingan Amerika Serikat dalam LTS yaitu akses dan stabilitas.

Oleh karenanya kepentingan AS akan berusaha agar kekuatannya di Asia Pasifik berkurang karena munculnya Tiongkok sebagai kekuatan baru yang mungkin bisa mengimbangi kekuatan AS. Oleh karena itu AS mulai menguatkan hegemoninya yang sudah ada di kawasan Asia Pasifik ini. Selain itu, pemerintah AS juga menyadari bahwa Asia Pasifik menjadi pendorong utama politik global saat ini. Kawasan Asia Pasifik meliputi banyak mesin utama penggerak ekonomi global, serta penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, dan juga merupakan rumah bagi beberapa sekutu kunci AS.

Untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok, AS melakukan beberapa strategi s. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah buckpassing. Dalam hal ini Amerika Serikat menggunakan Filipina sebagai salah satu instrumen penting dalam strategi ini. Dalam *buckpassing* dikenal ada beberapa istilah seperti *buck passer*, *buck catcher*, *aggressor*. Dalam hal ini AS berperan sebagai *buck passer*, Filipina sebagai *buck catcher*, Tiongkok menjadi *aggressor*, dan EDCA merupakan bentuk implementasi dari strategi tersebut.

Tabel 1.1. Posisi Penelitian

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	Jurnal: Eyes On The Prize? The Philippines-US Alliance and Defense Modernization Oleh: Julio S. Amador III	Eskplanatif	Hasil daripada penelitian ini membahas secara detil bahwa Filipina tidak boleh kehilangan kredibilitasnya sementara tetap mempertahankan keuntungan pertahanan militer yang ditawarkan Amerika.

2.	<p>Jurnal: Philippines-US Alliance Under Duterte: Unravelling?</p> <p>Oleh: Aaron Jed Rabena</p>	Deskriptif	<p>Membahas bagaimana pemerintahan Filipina dibawah kepemimpinan Duterte dan bagaimana Duterte merespon kritik politik luar negeri terhadap persoalan domestic Filipina. Peneliti menjabarkan persepsi Filipina dalam pandangannya terhadap aliansi dengan Amerika. Penelitian ini cenderung lebih membahas sisi sejarah ketimbang politik.</p>
3.	<p>Jurnal: Visiting Forces Agreement (VFA) in the Philippines: Insights on Issues of Sovereignty, Security and Foreign Policy</p> <p>Oleh: Mark Anthony M. Velasco</p>	Deskriptif	<p>Dari jurnal tersebut disebutkan bahwa meskipun Filipina mendapatkan keuntungan dari VFA dan SOVFA namun ada hal yang lebih besar yang harus diperhatikan, yaitu integritas Filipina sebagai negara.</p>
4.	<p>Jurnal: The Death of EDCA and Philippine-U.S. Security Relations</p> <p>Oleh: Renato Cruz De Castro</p>	Deskriptif	<p>Dalam jurnal ini membahas bagaimana sudut pandang Duterte yang melihat Filipina sebagai negara berdaulat yang berhak menentukan pilihan politiknya tanpa campur tangan negara lain serta menjelaskan mengenai interview Duterte dengan <i>South China</i> mengatakan bahwa AS akan mengambil</p>

			keuntungan dari gejolak politik di Laut Tiongkok Selatan terlepas dari statusnya sebagai sekutu Filipina.
5.	<p>Jurnal: US-Philippines: Resetting the Security Alliance?</p> <p>Oleh: Julius Cesar Trajano</p>	Deskriptif	<p>Penelitian ini membahas bagaimana Filipina menjadi gerbang masuk Amerika ke Asia Tenggara. Menjabarkan secara detail bagaimana kerjasama di bidang keamanan memiliki manfaat yang besar dari segi militer. Sebagai contohnya Filipina akan mendapatkan fasilitas dan perlengkapan militer Amerika untuk digunakan selama latihan gabungan. Sementara Amerika bisa mendapatkan tambahan pangkalan militer di Asia Tenggara.</p>
6.	<p>Jurnal: Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan</p> <p>Oleh: Melita Angelin Bidara Michael Mamentu, dan Trilke Tulung</p>	Kepentingan Nasional	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepentingan dan keterlibatan AS dalam konflik LTS. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dalam menganalisis dan menjelaskan pokok bahasan.</p>
7.	<p>Jurnal: China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara</p>	Deskriptif	<p>Menjelaskan bagaimana Amerika menjadi pihak penyeimbang di LTS. Sementara pihak</p>

	<p>Adidaya di kawasan Asia Pasifik</p> <p>Oleh: M Najeri Al Syahrin</p>		<p>Tiongkok melihat aksi Amerika sebagai pihak asing yang ikut campur dengan urusan territorial laut kawasan Asia. . Pergeseran kebijakan AS menjadi ‘<i>high-profile intervention</i>’ di kawasan Asia-Pasifik lebih memiliki kaitan dengan keamanan nasional yang harus dilindungi, baik dalam wilayah yang disengketakan maupun pada negara-negara di kawasan tersebut.</p>
8.	<p>Jurnal: Kerjasama Pertahanan Amerika Serikat dan Filipina Dalam Konteks Buckpassing Tahun 2014-2016</p> <p>Oleh: Diba Amalia Asano</p>	<p>Kepentingan Nasional</p>	<p>Menjelaskan bagaimana Amerika mencoba membendung kekuatan Tiongkok dengan meningkatkan hegemoninya di LTS melalui <i>buckpassing</i>. Dalam Strategi ini Amerika Serikat berperan sebagai buck passer, Filipina sebagai buck catcher, Tiongkok menjadi aggressor, dan EDCA merupakan bentuk implementasi dari strategi tersebut.</p>

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Poliheuristik

Alat analisis diperlukan dalam ilmu hubungan internasional untuk mengamati fenomena dan masalah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebuah kerangka teori untuk menjelaskan sebuah fenomena. Teori ini nantinya mampu menganalisa mengapa fenomena tersebut terjadi dengan cara yang paling umum dan memprediksi kapan fenomena tersebut akan terulang kembali. Teori berfungsi sebagai alat untuk penjelasan dan prediksi. Maka dari itu, penulis menggunakan Teori Poliheuristik untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang kemudian akan membantu penulis dalam menjelaskan mengapa Filipina mengakhiri *Visiting Force Agreement (VFA)*.

Teori Poliheuristik dikembangkan oleh Alex Mintz di Texas, Amerika Serikat pada awal 1990-an. Tujuan dari teori ini adalah untuk menyatukan tradisi kognitif dan rasionalis dalam mempelajari kebijakan luar negeri untuk menangkap proses **bagaimana** dan **mengapa** pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh kepala negara. Teori Poliheuristik berusaha memahami pendekatan kognitif dan rasionalis dalam sebuah analisa kebijakan luar negeri sebagai perspektif pelengkap tentang bagaimana para pemimpin negara membuat keputusan dan kebijakan luar negeri.³¹

Menurut Alex Mintz, Poliheuristik terdiri dari kata “Poli” yang berarti banyak dan “Heuristik” yang berarti pintas. Menurut PH, pemimpin menggunakan beberapa strategi untuk menyederhanakan kebijakan luar negeri yang kompleks. Pendekatan kognitif berguna pada tahap pertama ketika *decision maker* menggunakan strategi untuk menyederhanakan pilihan yang dianggap tidak bisa ditoleransi pada dimensi tertentu. Sementara itu, kata “Poli” juga berarti banyak yang digunakan pemimpin untuk menganalisis pilihan dengan kalkulasi untung-rugi pada tahap kedua.

Pada tahap pertama, pengambil kebijakan menolak pilihan yang dianggap merugikan menggunakan strategi *non-compensatory*. Strategi ini beranggapan bahwa kerugian pada suatu dimensi krusial tidak dapat ditoleransi dan harus dibayar dengan keuntungan pada dimensi lain. PH melihat dimensi politik sebagai “*the essence of decision*” dan pemimpin juga merupakan aktor politik. Sementara itu pemimpin melihat kerugian pada dimensi politik tidak bisa ditoleransi dan digantikan dengan dimensi lain. Dengan menggunakan strategi *non-compensatory*, pemimpin mengeliminasi kebijakan yang merugikan dimensi politiknya.

Pada tahap kedua, pemimpin menggunakan pendekatan rasional untuk memilih kebijakan akhir. Dengan perhitungan untung-rugi, pemimpin menganalisis konsekuensi dari pilihan yang tersisa. Pemimpin menganalisis masing-masing pilihan yang mampu menghasilkan risiko yang minimal dan memaksimalkan

³¹ Mintz, A. (2004, February 1). How Do Leaders Make Decisions?: A Poliheuristic Perspective. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/0022002703261056>

keuntungan. Pada akhirnya, setelah analisis untung-rugi pemimpin akan mampu menentukan kebijakan yang paling optimal. Berdasarkan pendekatan Rational Choice, menurut Graham Allison, pengambil keputusan akan cenderung mengambil kebijakan yang diasumsikan dapat mendapatkan keuntungan maksimal yang sejalan dengan tujuannya.

Secara umum, teori ini berusaha memahami perilaku individu dari apa yang jauh di dalam pikiran atau alam bawah sadar individu, dipengaruhi pengalaman mereka, riwayat hidup, juga faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pola pikir individu tersebut. Teori ini juga mencoba menjelaskan bahwa mental seseorang dapat menunjukkan riwayat hidup dan alasan dibalik pengambilan keputusan.³²

Teori pengambilan keputusan poliheuristik muncul sebagai upaya untuk mengintegrasikan teori pengambilan keputusan kognitif dan rasional yang telah menjadi kontribusi untuk pemahaman tentang proses dan hasil dalam domain pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Teori ini menempatkan proses pengambilan keputusan kedalam dua tahap di mana para pemimpin negara terlibat dalam perbandingan antara *cost* (biaya) dan *benefit* (manfaat/hasil) yang lebih rasional dari opsi yang lainnya. Pemrosesan tahap satu ini cenderung pragmatis dan tanpa banyak usaha.³³

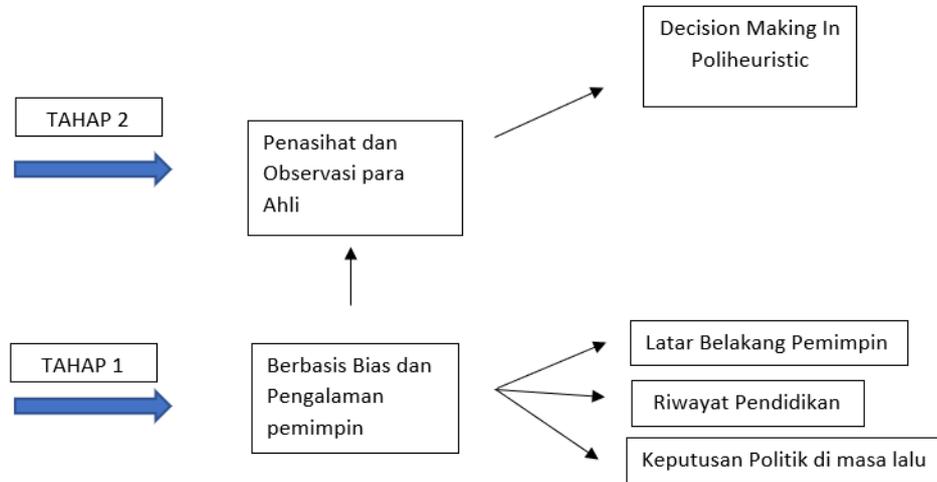
Persepsi poliheuristik berteori bahwa proses keputusan dimulai dengan seorang individu menghilangkan pilihan tertentu dengan cara non-kompensasi. Ini berarti bahwa daripada terlibat dalam analisis *cost-benefit* yang substantif rasional dari setiap opsi di mana kelemahan suatu dimensi dapat dikompensasikan dengan kekuatan yang terkait dengan kelemahan lain.³⁴

³² Mintz, A. (2005). Decision Analysis: Utilizing Poliheuristic Theory to Explain and Predict Foreign Policy and National Security Decisions. POLICY AND THE POLIHEURISTIC THEORY OF FOREIGN POLICY DECISION MAKING: A SYMPOSIUM, pp. 94-98.

³³ *ibid*

³⁴ *ibid*

Gambar 1.1 Bagan Proses Identifikasi Tahap 1 dan 2



Menurut teori poliheuristik, dan seperti yang ditunjukkan gambar di atas, pengambil keputusan mempertimbangkan alternatif yang berbeda dalam situasi keputusan dalam kaitannya dengan satu opsi alternatif yang tersedia. Dimana pada tahap 1 terdapat pilihan yang dipengaruhi oleh bias pengambil keputusan. Pilihan ini didasarkan pada pemikiran kognitif yang dapat berasal dari latar belakang pemimpin, riwayat pendidikan, serta keputusan politiknya di masa lalu.³⁵

Pada tahap satu cenderung dipengaruhi oleh penasihat dan observasi para ahli tentang pilihan pemimpin. Sementara pada tahap dua merupakan hasil evaluasi menjadi pilihan terbaik yang nantinya akan menjadi pilihan yang aman secara politik dan mampu memaksimalkan keuntungan dari fenomena yang terjadi.³⁶

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa satu fakta atau kondisi tersebut terjadi dan bagaimana hubungannya dengan fenomena lainnya. Peneliti melakukan pengamatan terhadap hubungan variabel yang sudah tercantum dalam penelitian, serta menguji hipotesa.

1.6.2 Level Analisis

³⁵ *ibid*

³⁶ *ibid*

Pentingnya menetapkan level analisis dalam hubungan internasional, yakni kita mampu memahami tindakan politik luar negeri suatu negara, yang disusun dalam beberapa pertanyaan, misalnya: (1) Apakah tindakan Individu (perilaku) itu merefleksikan preferensi individu sebagai seorang pemimpin negara; (2) Apakah tindakan tersebut merupakan hasil kekuatan politik dan birokrasi negara tersebut; (3) Apakah perilaku tersebut memang menjadi resonansi dari kepentingan nasional yang juga dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan nasional; (4) Apakah perilaku negara itu hanya merupakan respon atas situasi yang terjadi di dalam sistem regional maupun global.

Level analisis juga berfokus pada unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis itu sendiri merupakan suatu objek yang perilakunya hendak dianalisa, disebut juga sebagai variabel dependen dimana variabel ini dalam keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan, unit eksplanasi merupakan suatu objek yang hendak mempengaruhi unit analisa. Oleh karenanya, unit eksplanasi disebut juga sebagai variabel independen.

Adapun berbagai tingkat analisa menurut R.F. Hopkins & R.W. Mansbach, diantaranya analisa Reduksionis, Korelasionis, dan Induksionis. Analisa reduksionis yakni variabel independennya berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan variabel dependennya. Analisa korelasionis yakni antara variabel independen dan dependen berada pada tingkat yang sama. Terakhir analisa induksionis yakni variabel independen berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel dependennya.³⁷

Variabel dependen atau unit analisa dalam penelitian ini adalah kebijakan mengapa Filipina menanggukkan VFA selama periode 2020-2021, sedangkan variabel Independen atau unit eksplanasinya adalah alasan yang mempengaruhi kebijakan tersebut, adalah keputusan Duterte sebagai kepala negara yang menganggap Amerika tidak menghargai kedaulatan serta keputusan dalam negeri Filipina terkait *war on drugs* yang secara langsung berimbas pada penanggukan VFA. Untuk itu dapat disimpulkan tingkat analisa pada penelitian ini yakni reduksionis.

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Dalam teknik pengumpulan data penulis akan mengeksplorasi data yang sesuai dengan pembahasan mengenai *Mengapa Duterte menanggukkan VFA*.

³⁷ Raymond F. Hopkins and Richard W. Mansbach, 1973, *Structure and Process in International Politics*, New York: Harper & Row.

Dalam hal ini data yang diperoleh dari berbagai buku atau literatur, dokumen, jurnal, artikel, kliping maupun informasi dari media cetak lainnya yang relevan dengan masalah-masalah yang diamati. Setelah dikumpulkan, data diseleksi dan dikelompokkan kedalam beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan sistematika penulisan.

Menurut Lofland sumber data yang paling penting dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sisanya berupa data tambahan seperti dokumen dan sebagainya.³⁸ Oleh karenanya penelitian ini mengambil jenis data berupa kata-kata, sumber data tertulis, foto dan data statistik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berusaha mencari bukti data baik secara numerik ataupun bukti dokumen perjanjian yang dapat dianalisa dengan menggunakan landasan konseptual yang telah ditentukan oleh penulis. Landasan Konseptual digunakan sebagai sebuah interpretasi hasil data yang sudah berhasil ditemukan, dan dibuatkan kesimpulan dari data yang didapatkan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui *library research* atau studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, makalah, dokumen, video pidato dan situs-situs resmi yang dimuat di internet yang menjelaskan secara rinci mengenai fokus bahasan tentang *War On Drugs* dan pembunuhan diluar pengadilan yang nantinya mempengaruhi penangguhan VFA oleh Duterte akibat sanksi politik yang diberikan Amerika kepada pejabat pemerintahan Filipina. Model penelitian yang digunakan penulis juga menggunakan model penelitian studi kasus yang menggunakan konsep penelitian sebagai bahan analisa yang mampu menjawab permasalahan yang ada dalam pertanyaan masalah. Data yang diambil kemudian disesuaikan dengan topik permasalahan, agar kemudian permasalahan bisa dipahami dan dapat ditampilkan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan, dengan ini diharapkan mampu menjelaskan analisa yang ada pada penelitian ini.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan Waktu

Batasan waktu yang diambil peneliti adalah sejak masa pemerintahan Rodrigo Duterte dimulai yaitu tahun 2016 lalu hingga kasus VFA dipulihkan pada Agustus 2021. Batasan waktu ini dimaksudkan agar penulis dapat tetap terfokus

³⁸ Masyhuri dan Zainuddin, 2008, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung.

terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, juga agar membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data.

Batasan Materi

Agar pembahasan dalam materi ini tidak melebar jauh maka peneliti berfokus pada penjelasan *War on Drugs* yang menjadi faktor utama penangguhan VFA dan dampak penangguhan VFA pada hubungan diplomatik antara Filipina-Amerika dan bagaimana peran Duterte sebagai kepala negara mempengaruhi kebijakan luar negeri Filipina. Oleh karena itu maka Batasan Materi akan mencakup sejak Rodrigo Duterte dilantik sebagai presiden pada tahun 2016 hingga kasus VFA berakhir pada tahun 2021.

1.7 Hipotesa

Dari uraian diatas penelitian ini mengajukan jawaban sementara yaitu; presiden Duterte menanggukhan VFA didasarkan pada kritik AS terhadap pembunuhan tanpa pengadilan yang dilakukan pemerintah Filipina pada pengedar dan pengguna narkoba dalam kebijakan *War On Drugs* Duterte. Pemerintah AS menganggap Duterte telah melanggar HAM sehingga AS menerapkan sanksi diplomatik berupa mencabut visa beberapa senator Filipina yang terlibat secara langsung dalam kebijakan *War on Drugs* untuk menegaskan bahwa AS menantang kebijakan *War On Drugs* Duterte yang tidak memperhatikan HAM. Menanggapi hal ini, Duterte kemudian membalas dengan penangguhan VFA selama periode 2020-2021 dengan alasan bahwa AS telah mencampuri urusan dalam negeri Filipina dan dianggap telah melanggar kedaulatan negara serta menentang supremasi hukum yang ada di Filipina.

Berdasarkan teori Poliheuristik adapun faktor yang mendasari keputusan Duterte untuk menanggukhan VFA didasarkan pada ketidakpuasannya yang menganggap AS terlalu mencampuri urusan dalam negeri Filipina dan menyepelekan kedaulatan negara Filipina. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penggunaan umpatan oleh Duterte saat merespon kritik AS terhadap VFA di konferensi pers. Yang menjadi puncak keputusan Duterte untuk menanggukhan VFA adalah saat AS mencabut visa senator Filipina Ronald dela Rosa yang merupakan senator kunci pemerintahan Duterte karena terkait secara langsung terkait dengan *War On Drugs*.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2. Sistematika Penulisan

BAB	ISI
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Teori / Konsep 1.5.1 Teori Poliheuristik oleh Alex Mintz 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Level Analisis 1.6.3 Jenis dan Sumber Data 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 1.7 Hipotesa 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	DINAMIKA HUBUNGAN FILIPINA-AS
	2.1 Sejarah Kerjasama Filipina-AS Kaitan Terhadap VFA 2.1.1 Hubungan Bilateral Filipina-AS sebelum era Duterte 2.1.2 Kerjasama Filipina-AS di Bidang Ekonomi 2.1.3 Kerjasama Filipina-AS di Bidang Keamanan 2.2 Pengaruh <i>War on Drugs</i> Terhadap Penanggulangan VFA 2.2.1 <i>War on Drugs</i> di era Duterte 2.2.2 Kecaman AS terhadap <i>War on Drugs</i> di era Duterte 2.3 Penanggulangan VFA oleh Presiden Rodrigo Duterte

	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANGGUHAN VFA OLEH RODRIGO DUTERTE
BAB III	3.1 Kuasa Duterte Dalam Pemerintahan Filipina 3.2 Aspek Kognitif Duterte 3.3 Aspek Rasional Duterte
BAB IV	PENANGGUHAN VFA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK FILIPINA-AMERIKA SERIKAT
	4.1 Kebijakan Rodrigo Duterte Terhadap Kasus VFA 4.2 Penerapan Analisis Poliheuristik 4.2 Evaluasi kepemimpinan populis-pragmatik Rodrigo Duterte
BAB V	PENUTUP
	5.1 Kesimpulan